



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
TAHUN 2006 **NOMOR 16**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2006

TENTANG

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN
PENGEDARAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghindari bahaya penggunaan minuman beralkohol secara berlebihan dikalangan masyarakat, perlu ditingkatkan usaha pengawasan, pengendalian, penertiban terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Mamuju Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang pengawasan, pengendalian dan penertiban pengedaran minuman beralkohol;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270) ;
3. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1090) ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 - 67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MAMUJU UTARA**

Dan

BUPATI MAMUJU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN
PENERTIBAN PENGEDARAN MINUMAN
BERALKOHOL**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Utara;
- b. Bupati ialah Bupati Mamuju Utara;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara;
- d. Minuman Beralkohol adalah Minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan

destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung ethanol;

- e. Perusahaan adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang Usaha Minuman Beralkohol yang dapat berbentuk Perorangan, Persekutuan atau Badan Hukum yang berkedudukan di Wilayah Kabupaten Mamuju Utara;
- f. Pengedaran Minuman Beralkohol adalah penyaluran Minuman beralkohol untuk diperdagangkan;
- g. Penjual Langsung untuk diminum adalah Perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat tertentu;
- h. Distributor adalah Perusahaan yang ditunjuk Importir Minuman Beralkohol dan atau Industri Minuman Beralkohol untuk menyalurkan minuman Beralkohol asal Impor dan atau hasil Produksi Dalam Negeri;
- i. Sub Distributor adalah Perusahaan yang ditunjuk pada distributor untuk menyalurkan minuman Beralkohol di Wilayah Kabupaten Mamuju Utara;
- j. Pengecer adalah Perusahaan yang menjual secara eceran minuman beralkohol khusus dalam kemasan;
- k. Rumah Sakit adalah sarana pelayanan Kesehatan termasuk Rumah Bersalin, Puskesmas, Balai Kesehatan dan Praktek Dokter;
- l. Sekolah adalah sarana kegiatan belajar mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi termasuk Pusat Kursus –kursus;
- m. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang disingkat SIUPMB adalah surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan Khusus Minuman Beralkohol Golongan A,B dan C;
- n. Hotel adalah Bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu,

- dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran;
- o. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk Usaha Jasa Boga atau Katering;
 - p. Bar adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menjual minuman termasuk minuman beralkohol untuk umum dan diminum ditempat;
 - q. Pub/Karaoke adalah Tempat untuk bersantai sambil berkaraoke dengan menikmati minuman dan makanan ringan;
 - r. Klub Malam adalah suatu usaha yang disediakan untuk santai sambil menikmati makanan ringan dilengkapi dengan sarana dansa serta dibuka untuk malam hari;
 - s. Diskotik adalah tempat yang dilengkapi dengan sarana hiburan untuk menikmati makanan ringan dilengkapi dengan sarana hiburan untuk menikmati minuman dan makanan ringan sambil joget;
 - t. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten Mamuju Utara yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah;
 - u. Tim Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas untuk melakukan pengkajian tentang layak tidaknya suatu perusahaan diberikan izin untuk selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Bupati serta melakukan pengawasan, pengendalian dan penertiban pengedaran Minuman beralkohol dalam Wilayah Kabupaten Mamuju Utara;

B A B II

KETENTUAN PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan yang memasukkan, menyalurkan, mengedarkan dan menjual minuman Beralkohol didalam Wilayah Kabupaten terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Bupati.
- (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud (1) pasal ini adalah dalam bentuk Keputusan Bupati tentang SIUPMB.

Pasal 3

- (1) Jumlah dan jenis minuman beralkohol yang dapat dimasukkan, disalurkan, diedarkan dan atau dijual tidak boleh melebihi jumlah yang ditetapkan dalam SIUPMB.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 2 berlaku selama 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang lagi.
- (3) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Izin dengan persyaratan yang sama dalam permohonan SIUPMB yang baru.
- (4) Pemegang SIUPMB sebagaimana dimaksud Pasal 2 tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan Bupati.

Pasal 4

Izin sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah dikeluarkan setelah mendapatkan surat keterangan dari Camat.

Pasal 5

Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam 3 golongan :

- a. Minuman Beralkohol Golongan A yaitu minuman yang mengandung kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (seratus perseratus) sampai 5% (lima perseratus).

- b. Minuman Beralkohol Golongan B yaitu Minuman yang mengandung kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus).
- c. Minuman Beralkohol Golongan C yaitu Minuman yang mengandung kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

BAB IV PERIZINAN

Pasal 6

SIUPMB terdiri dari :

1. SIUPMB Sub Distributor;
2. SIUPMB Pengecer;
3. SIUPMB penjual langsung untuk diminum.

Pasal 7

- (1) SIUPMB sub distributor diberikan kepada Perusahaan yang telah ditunjuk oleh distributor untuk menyalurkan minuman beralkohol didalam Wilayah Kabupaten Mamuju Utara;
- (2) SIUPMB pengecer diberikan kepada Perusahaan yang menjual secara eceran Minuman Beralkohol dalam kemasan;
- (3) SIUPMB penjual langsung untuk diminuman diberikan kepada Perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol untuk diminum ditempat;

Pasal 8

Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh SIUPMB adalah setiap permohonan disampaikan kepada Bupati dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut :

1. SIUPMB Sub Distributor :

- a. Penunjukan sebagai Sub Distributor untuk menyalurkan Minuman Beralkohol di Wilayah Kabupaten Mamuju Utara dari Distributor Pusat;
- b. Rekomendasi dari Tim Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
- c. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- e. Izin Gangguan (HO);
- f. Rekomendasi dari Kantor Perindustrian dan Perdagangan Provinsi tempat sub distributor berkedudukan;
- g. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

2. SIUPMB pengecer :

- a. Rekomendasi dari Tim Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
- b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- e. Izin Gangguan (HO);

3. SIUPMB Penjual langsung untuk diminum :

- a. Rekomendasi dari Tim Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
- b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- e. Izin Gangguan (HO);
- f. Izin usaha bagi Hotel, Restoran, Bar, Pub dan Klub Malam, Diskotik dan atau Karaoke;

Pasal 9

- (1) Sebelum Bupati memberikan SIUPMB sebagaimana dimaksud Pasal , terlebih dahulu harus diumumkan disekitar lokasi yang diusulkan oleh pemohon selama 2 (dua) minggu;

- (2) Apabila masyarakat disekitar rencana lokasi usaha perdagangan minuman beralkohol keberatan, maka Bupati dapat menolak memberikan SIUPMB;

Pasal 10

- (1) SIUPMB Golongan A penjual langsung untuk diminum hanya dapat diberikan kepada pemilik :
- a. Hotel;
 - b. Restoran;
 - c. Bar;
 - d. Pub;
 - e. Klub Malam;
 - f. Diskotik;
 - g. Karaoke;
 - h. Ditempat lain/tertentu yang ditetapkan oleh Bupati dengan jarak radius diatas 100 meter dari tempat Ibadah, Sekolah, Rumah Sakit, Pemukiman dan Perkantoran;
- (2) SIUPMB Golongan B dan C penjual langsung untuk diminum hanya dapat diberikan kepada pemilik :
- a. Hotel Berbintang 3,4 dan 5;
 - b. Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka;
- (3) Penjualan Minuman Beralkohol Golongan B dan C sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a pasal ini di izinkan dikamar hotel untuk diminum ditempat dengan kemasan tidak lebih besar dari 187 (seratus delapan puluh tujuh) ml perkemasan;

Pasal 11

- (1) Penjual langsung untuk diminum Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C hanya diizinkan menjual Minuman Beralkohol untuk diminum ditempat;
- (2) Sub Distributor Minuman Beralkohol hanya diizinkan mendistribusikan minuman beralkohol kepada :

a. Penjual langsung untuk diminum, dengan jenis minuman beralkohol Golongan A, B dan C berdasarkan SIUPMB yang dimiliki;

b. Pengecer dengan jenis minuman beralkohol khusus Golongan A;

- (4) Pengecer Minuman Beralkohol hanya diizinkan menjual minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan Minuman beralkohol Golongan A;

Pasal 12

- (1) Disamping golongan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan jenis SIUPMB sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1), Bupati dapat menetapkan lokasi/tempat pengecer dan atau penjual langsung untuk diminum minuman beralkohol mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya yang kadar alkoholnya setinggi-tingginya 15% (lima belas perseratus);
- (2) Sub Distributor, penjual langsung untuk diminum termasuk Hotel, Restoran, Bar, Pub dan Klub Malam, Diskotik, Karoeke, Pedagang Keliling, Pedagang Kaki Lima, Pedagang Pinggir Jalan yang tidak menggunakan kendaraan bermotor untuk menjual Minuman Beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan, wajib memperoleh SIUPMB bagi yang memperdagangkan Minuman Beralkohol mengandung remaph-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan yang kadar alkoholnya diatas 5% sampai 15%;
- (3) Minuman untuk tujuan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Menteri kesehatan;

BAB V

LABEL DAN TANDA PENGENDALI

Pasal 13

- (1) Pada setiap kemasan atau botol minuman beralkohol Golongan A, B dan C yang dikonsumsi wajib dilengkapi dengan label sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Bahasa Perundang-Undangan yang berlaku;
 - a. Nama Produk;
 - b. Kadar Alkohol;
 - c. Daftar barang yang digunakan;
 - d. Berat bersih atau isi bersih;
 - e. Nama dan alamat pihak yang memproduksi;
 - f. Tanggal, Bulan dan Tahun Kadaluarsa;
 - g. Pencantuman tulisan "Minuman Beralkohol"
- (3) Disamping label sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini setiap pemegang SIUPMB Sub Distributor, diwajibkan menempelkan tanda pengendali pada setiap botol/kemasan Minuman Keras yang diedarkan untuk menghindari pemalsuan;

Pasal 14

- (1) Minuman beralkohol yang tidak mempunyai label dan tanda pengendali digolongkan minuman beralkohol yang tidak memenuhi syarat untuk diedarkan di dalam Wilayah Kabupaten Mamuju Utara;
- (2) Terhadap minuman beralkohol tradisional diperlakukan ketentuan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Pasal 15

- (1) Bentuk, uraian, ukuran dan warna tanda pengendali ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati;
- (2) Warna tanda Pengendali untuk tiap jenis minuman keras disesuaikan dengan golongan;

BAB VI KETENTUAN LARANGAN

Pasal 16

- (1) Siapapun dilarang menjadi pengecer minuman beralkohol Golongan B dan C;
- (2) Siapapun dilarang menjadi penjual langsung untuk diminum minuman beralkohol Golongan B dan C kecuali yang ditentukan dalam pasal 10 ayat (2);

Pasal 17

- (1) Dilarang mengecer dan atau menjual langsung untuk diminum ditempat minuman beralkohol Golongan A :
 - a. Diwarung/Kios Minuman, Rumah Makan, Kantin Kafe, Wisma, Pasar, Gelanggang Olah Raga, Gelanggang Remaja, Kantor, Rumah Billiar, Gelanggang Permainan dan Ketangkasan, Panti Pijat, Kaki Lima, Terminal, Stasiun, Pasar, Kios-kios Kecil, Penginapan Remaja, Rumah-rumah Penduduk, Bumi Perkemahan;
 - b. Tempat/Lokasi lainnya yang berdekatan dengan tempat ibadah, Sekolah, Rumah Sakit, Pemukiman dan Perkantoran dengan jarak radius 100 meter;

Pasal 18

Pengecer dan penjual langsung untuk diminum dilarang :

- a. Menjual minuman beralkohol kepada anak dibawah umur 21 Tahun, Pelajar, Mahasiswa, Anak-anak, Anggota TNI/POLRI, Pegawai Negeri Sipil serta pejabat lain yang berseragam;
- b. Menjual minuman yang beralkohol diruangan atau tempat yang dapat dimasuki oleh umum;
- c. Menjual minuman yang mengandung alkohol diluar batas waktu yang ditetapkan dalam izin;
- d. Menjual minuman beralkohol kepada orang yang telah atau dianggap telah minum minuman beralkohol ditempat lain;
- e. Menjual minuman beralkohol melampaui jumlah yang ditetapkan dalam izin;

Pasal 19

- (1) Penjual langsung untuk diminum minuman beralkohol Golongan A tidak boleh melayani pengguna/peminum diatas 1000 ml;
- (2) Penjual minuman beralkohol Golongan B dan C tidak boleh melayani pengguna/peminum diatas 100 ml;
- (3) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (2) pasal ini adalah penjualan langsung untuk diminum di kamar hotel sebagaimana yang ditetapkan ayat (3) pasal 10;
- (4) Dilarang menjual dan mengedarkan minuman beralkohol Golongan A, B dan C yang isi kemasannya kurang dari 180 ml;

Pasal 20

- (1) Setiap orang dilaarng minum minuman beralkohol ditempat penjualan sampai mabuk;
- (2) Setiap orang dalam keadaan mabuk dilarang ditempat umum dan mengemudi kendaraan;

BAB VIII K E W A J I B A N

Pasal 21

- (1) Sub distributor, pengecer dan penjual langsung untuk diminum harus menyimpan minuman beralkohol Golongan A, B dan C digudang yang terpisah dengan barang-barang;
- (2) Pemasukan dan Pengeluaran Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C ke dan dari Gudang penyimpanan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dibuatkan Kartu Data Penimbunan;
- (3) Kartu Data Penimbunan sebagaimana dimaksud ayat (2) sekurang-kurangnya memuat jumlah, jenis, merek, tanggal pemasukan barang kegudang dan asal barang;
- (4) kartu Data Penimbunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) wajib diperlihatkan kepada pengawas yang melakukan pemeriksaan;

Pasal 22

- (1) Penjual langsung untuk diminum minuman beralkohol Golongan A, B dan C hanya diizinkan melakukan penjualan pada malam hari pukul 19.00 s/d 02.00 wita.
- (2) Pada hari libur diluar Hari Raya Keagamaan waktu penjualan malam hari dapat diperpanjang dengan maksimum 2 jam;

Pasal 23

Perusahaan minuman beralkohol berkewajiban :

- a. Menjaga ketertiban dan keamanan dalam ruang tempat penjualan dan sekitarnya;
- b. Meminta kepada petugas keamanan untuk menerbitkan dan mengamankan kegaduhan yang terjadi ditempat penjualannya bila tidak dapat dicegah sendiri;
- c. Izin harus ditempatkan sehingga mudah dilihat oleh umum;
- d. Harus menempelkan peringatan bahwa setiap orang yang meminum minuman beralkohol tidak boleh berlebihan atau sampai mabuk;
- e. Menetapkan dan menempelkan batas waktu penjualan;

B A B VIII P E L A P O R A N

Pasal 24

- (1) Sub distributor, pengecer dan atau penjual minuman beralkohol wajib melaporkan realisasi pengadaan dan penyaluran dan penjualan minuman beralkohol Golongan A, B dan C kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan dan Tim Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Kabupaten Mamuju Utara;

- (2) Laporan realisasi pengadaan dan penyaluran serta penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pula :
 - a.jenis dan jumlah minuman beralkohol;
 - b.Pengguna/Peminum minuman beralkohol;
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setiap triwulan Tanah Kalender berjalan sebagai berikut :
 - a. Triwulan I : Januari s/d 31 Maret
 - b. Triwulan II : 1 April S/d 30 Juni
 - c. Triwulan III : 1 Juli s/d 30 September
 - d. Triwulan IV : Oktober s/d 31 Desember
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dengan menggunakan formulir yang bentuknya akan ditetapkan oleh Bupati;

Pasal 25

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, Perusahaan wajib memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;

B A B IX P E G A W A S A N

Pasal 26

Bupati melaksanakan pengawasan, penertiban dan pemantauan serta mengidentifikasi tempat sub distributir, pengecer dan atau penjualan minuman beralkohol;

Pasal 27

- (1) Untuk melaksanakan Pengawasan dan Penertiban pengedaran minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pasal 26 dibentuk Tim yang beranggotakan Instansi terkait;

- (2) Disamping melakukan pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Tim memberikan pula pertimbangan kepada Bupati dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 12 Peraturan Daerah;

Pasal 28

Bupati berwenang mencabut SIUPMB sub distributor, SIUPMB pengedar dan SIUPMB penjual yang telah diberikan atau mengurangi jumlah minuman beralkohol yang diizinkan untuk diedarkan dan atau dijual karena pertimbangan kepentingan umum;

Pasal 29

Bupati dapat menghentikan penjualan minuman beralkohol karena pertimbangan khusus dan pada hari-hari tertentu karena dianggap akan mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat;

B A B X S A N K S I

Pasal 30

- (1) Perusahaan Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C diberi peringatan tertulis apabila :
 - a.Apabila laporan/pengaduan dari Pejabat yang berwenang dan atau masyarakat bahwa Perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran jadwal penjualan minuman beralkohol sesuai ketentuan pasal 22 Peraturan Daerah;
 - b.Tidak melakukan kewajibannya sesuai ketentuan dalam pasal 23, pasal 24, dan atau pasal 25 Peraturan Daerah ini;
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 kali berturut-turut dengan tenggang

waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kelender oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;

Pasal 31

- (1) SIUPMB Golongan A, B dan C dicabut apabila :
 - a. SIPUMB yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu; atau
 - b. Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan-perbaikan setelah melampaui batas waktu peringatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2);
- (2) Pencabutan SIUPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang menerbitkan SIPUMB tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu;
- (3) Perusahaan yang telah dicabut SIUPMBnya tidak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh SIUPMB baru dan dimasukkan dalam daftar Hitam;

B A B XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2, pasal 3 ayat (1), paal 11, pasal 12 ayat (2), pasal 13, pasal 14, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 21 dan atau pasal 22 Peraturan Dearah ini diancam Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan merampas barang tersebut selanjutnya dimusnahkan untuk Negara;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran;

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan Undang-Undang Hukum Acara pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau Keluarganya;
 - i. Melakukan tindakanlain menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

B A B XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Terhadap SIPUMB penjual langsung untuk diminum dan SIUPMB pengecer yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini sepanjang sisa masa berlakunya tidak melebihi satu Tahun sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dengan kewajiban melakukan pendaftaran ulang;

B A B XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu

Pada tanggal 30 Oktober 2006

BUPATI MAMUJU UTARA

T TD

H. ABDULLAH RASYID

Diundangkan di Pasangkayu
Pada tanggal 1 Nopember 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH

TTD
MUHAMMAD AMRAN ALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2006
NOMOR 16

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2006

TENTANG

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN
PENGEDARAN MINUMAN BERALKOHOL

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa penggunaan minuman beralkohol secara berlebihan sangat berpengaruh terhadap kesehatan fisik, kejiwaan maupun sosial, yang pada akhirnya akan membawa pengaruh terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

Minuman beralkohol pada dasarnya bukan merupakan konsumsi untuk umum, oleh karenanya didalam memasukkan, menyalurkan, mengedarkan dan menjual perlu dilakukan pengendalian dan penertiban secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan untuk menghindari bahaya penyalahgunaan minuman beralkohol khususnya dikalangan Generasi Muda sebagai Generasi pewaris cita-cita Bangsa dan Negara Indonesia, oleh karena dengan penggunaan minuman beralkohol secara berlebihan sangat mempengaruhi kesehatan fisik, kejiwaan maupun sosial.

Telah menjadi tekad Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian dan penertiban pengedaran minuman beralkohol dengan alasan :

- a. Masih seringnya terjadi kriminalitas antara lain pelanggaran Lalu Lintas dan gangguan Kantibmas lainnya yang diawali dengan meminum minuman beralkohol yang berlebihan;
- b. Konsumsi minuman beralkohol yang berlebihan dapat merusak kesehatan fisik, kejiwaan maupun sosial;
- c. Kebiasaan penggunaan minuman beralkohol secara berlebihan dapat dimanfaatkan oleh golongan-golongan

tertentu untuk merongrong dan mengganggu stabilitas Pembangunan Daerah;			
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah kabupaten Mamuju Utara perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur didalamnya tentang pengawasan terhadap pengedaran minuman beralkohol yang antara lain menetapkan tentang syarat-syarat penjualan minuman beralkohol sampai kepada jenis-jenis minuman beralkohol yang dapat diedarkan dan lokasi pengedaran dan penjualannya.		ayat (2) point b	: Mengingat bahwa pengecer hanya dapat menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol Golonga A, maka Sub Distributor hanya dapat mendistribusikan kepada pengecer minuman beralkohol Golongan A.
Agar pengawasan dapat dilaksanakan secara terkoordinasi, maka dibentuk Tim Pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dengan melibatkan Instansi terkait yang sebelum perizinan pengedaran minuman beralkohol itu dikeluarkan terlebih dahulu Tim Pengawasan melakukan pengecekan dan pengkajian layak tidaknya suatu perusahaan itu diberikan Izin penjualan/peredaran Minuman Beralkohol.		Pasal 12 ayat (1)	: Tata cara permohonan perizinan untuk Sub Distributor dan penjual Minuman Beralkohol yang mengandung rempah-rempahdan sejenisnya untuk kesehatan dengan melampirkan antara lain SIUP, SITU, TDP, Izin Gangguan, Izin Usaha bagi Hotel, Restoran, Bar, Karoke, Pub, Klub Malam, Diskotik.
Untuk mengetahui jumlah minuman keras yang beredar di masyarakat digunakan alat pembantu yaitu tanda pengendali yang ditempelkan pada setiap botol/kemasan minuman sesuai dengan kadar alkoholnya, serta diberikan label untuk menghindari pemalsuan.			
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL			
Pasal 1	: Cukup jelas		
Pasal 2	: Cukup jelas		
Pasal 3	: Cukup jelas	Pasal 13	: Cukup jelas
Pasal 4	: Cukup jelas	Pasal 14	: Cukup jelas
Pasal 5	: Cukup jelas	Pasal 15	: Cukup jelas
Pasal 6	: Cukup jelas	Pasal 16	: Mengingat Minuman Beralkohol Golongan B dan C ini cukup tinggi kadar alkoholnya, maka siapapun dilarang untuk menjadi pengecer. Sub distributor hanya dapat menjual Minuman Beralkohol
Pasal 7	: Cukup jelas		
Pasal 8	: Cukup jelas		
Pasal 9	: Cukup jelas		
Pasal 10	: Cukup jelas		
Pasal 11 ayat (2) point a	: Penjual langsung untuk diminum hanya dapat melayani		

	Golongan B dan C kepada Hotel Berbintang 3, 4 dan 5, Restoran dengan Tanda talam Kencana dan Talam Selaka sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2).
Pasal 17	: Pelarangan ini dimaksudkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan mengingat bahwa tempat-tempat yang dimaksudkan tersebut merupakan tempat atau sarana yang dapat dimasuki oleh umum.
Pasal 18	: Cukup jelas
Pasal 19	: Cukup jelas
Pasal 20	: Cukup jelas
Pasal 21	: Cukup jelas
Pasal 22	: Cukup jelas
Pasal 23	: Cukup jelas
Pasal 24	: Cukup jelas
Pasal 25	: Cukup jelas
Pasal 26	: Cukup jelas
Pasal 27	: Cukup jelas
Pasal 28	: Cukup jelas
Pasal 29	: Cukup jelas
Pasal 30 s/d pasal 36	: Cukup jelas